Hukum Dagang :

Dengan diterimanya oleh penggugat cek, giro bilyet dan kwitansi tersebut dari tergugat, maka penggugat mempunyai hak atas jumlah yang tertulis dalam cek, giro bilyet dan kwitansi.

Hukum Acara Perdata :

Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak.

Keputusan Mahkamah Agung, tgl. 28 Mei 1984, No. 588K/Sip/1983.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Allansyah Alie, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 232 Km. 4½ Banjarmasin, pemohon kasasi dahulu penggugat-terbanding;

m e l a w a n

Mar'ie Talib, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 26 — Banjarmasin, termohon kasasi dahulu tergugat-pembanding;

Makhamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas **dalil-dalil:**

bahwa tergugat asli secara berturut-turut telah meminjam uang kepada penggugat asli seperti yang diperinci dalam surat gugatan yang semuanya berjumlah Rp. 259.983.600,-;

bahwa untuk masing-masing pinjaman itu tergugat asli berjanji akan membayar kembali lunas kepada panggugat asli dalam waktu

paling lama 1 bulan setelah tanggal pinjaman tersebut, tetapi tidak ditepati tergugat asli, sehingga telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, hingga penggugat asli telah kehilangan keuntungan sebesar 6% sebulan;

bahwa penggugat asli juga mohon agar tergugat asli membayar ganti rugi kepada penggugat asli sebesar 6% sebulan, hingga keputusan ini dilaksanakan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang penggugat ajukan dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa tergugat berada dalam keadaan lalai (wanprestasi);
- Menghukum tergugat untuk membayar kembali pinjamannya kepada penggugat sebanyak Rp. 259.983.600,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) secara sekaligus dan tunai;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa keuntungan yang diharapkan (winstderving); akibat tertahannya uang penggugat sebanyak 6% tiap-tiap bulan, yaitu untuk pinjaman-pinjaman dalam bulan Mei 1980 sebanyak Rp. 143.075.000,- terhitung sejak tanggal 1 Juli 1980, untuk pinjaman dalam bulan Juli sebanyak Rp. 24.680.430,- terhitung sejak tanggal 1 September 1980, dan untuk pinjaman dalam bulan Pebruari 1981 sebanyak Rp. 92.228.163,- terhitung sejak tanggal 9 Maret 1981 dan seterusnya diperhitungkan sampai keputusan dalam perkara ini dilaksanakan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin atas barang-barang hak milik tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- Menyatakan bahwa keptusun dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (executie uitvoerbaar bij voorraad) meskipun verzet, banding atau kasasi;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

A t a u

— Setidak-tidaknya memberikan keputusan yang lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

bahwa atas gugatan penggugat asli, tergugat asli telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa gugatan penggugat asli tidak sempurna karena tidak menggugat Suhaemi sebagai tergugat asli II (yang menerbitkan dan menandatangani serta penanggung jawab atas cheque BNI sejumlah Rp. 26.575.000,— dan tidak menggugat Harryanto alias Ping Seng sebagai tergugat asli III yang telah menandatangani dan menerbitkan cheque OEB No. 526212 tanggal 20 Mei 1980 seharga Rp. 5.000.000,—;

bahwa tergugat asli juga mengajukan gugatan balik/rekonpensi atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa akibat perbuatan tergugat rekompensi membuat laporan palsu kepada Kepolisian Resort 1301, maka nama baik penggugat rekompensi dicemarkan, sehingga penggugat rekompensi menuntut ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,— dan untuk menjamin tuntutan penggugat rekompensi tersebut, penggugat rekompensi mohon diletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat rekompensi;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat rekompensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekompensi seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan penggugat rekompensi, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan;
- Menyatakan bahwa tergugat rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum tergugat rekompensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,— (tiga milyar rupiah) untuk memulihkan nama baik yang telah dihancurkan, dan untuk mengembalikan martabat yang telah dirusak;
- Menyatakan sah dan berharga sita conservatoir dalam rekompensi ini;
- Menyatakan bahwa putusan dalam rekompensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun tergugat rekompensi verzet, banding atau kasasi;
- Menghukum tergugat rekompensi membayar semua ongkos perkara;

Setidak-tidaknya :

Memberikan keputusan lain yang selaras dengan rasa keadilan di dalam suatu peradilan yang baik dan luhur;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Maret 1982 No. 12/1982. Perd.B. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Gugatan Kompensi :

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat;

Menetapkan pemeriksaan perkara untuk diteruskan;

II. Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti penggugat;

Menyatakan bahwa tergugat adalah lalai (wanprestasi) untuk membayar kembali pinjamannya kepada penggugat sebesar Rp. 259.983.600,-;

Menghukum tergugat untuk membayar kembali pinjamannya kepada penggugat sebesar Rp. 259.983.600,-;

Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 5% setiap bulan berupa keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh penggugat, untuk pinjaman sebesar :

Rp. 143.075 000,- terhitung sejak tanggal 1 Juli 1980;

Rp. 24.680.437,- terhitung sejak tanggal 1 September 1980;

Rp. 92.228.163,- terhitung sejak tanggal 9 Maret 1981; hingga keputusan ini dilaksanakan;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ("Conservatoir Beslag") atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik tergugat yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 1982, dan tanggal 25 Maret 1982 No. 12/1982 Perd.B., dan Jurusita Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Pebruari 1982 dan tanggal 26 Maret 1982 No. 12/1982.Perd.B;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditafsir sebesar Rp.288.625,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

B. Dalam Gugatan Rekonpensi :

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditafsir sebesar nihil;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Pokok Perkara telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusannya tanggal 12 Agustus 1982 No. 135/1982/B/Pdt.PT.BJM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tergugat konpenssi/penggugat rekompensi – pembanding tersebut;

Dalam Konpenssi:

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 12/1982.Perd.B. tanggal 27 Maret 1982;

Dalam Pokok Perkara :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Maret 1982 Nomor 12/1982.Perd.B. yang dimohonkan banding itu;

Mengadili sendiri :

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Maret 1982 Nomor 12/1982. Perd.B. untuk sebagian rekompensi;

Menghukum penggugat konpenssi/tergugat rekompensi terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding dirancang sebesar Rp. 16.675,- (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Memerintahkan agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 7 Desember 1982 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 1982 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 31/1982/kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 1982;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding yang pada tanggal

27 Desember 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pengugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa dengan mencampuradukkan jumlah uang yang tertulis dalam cek dan giro bilyet sedangkan kekuatan hukum dari kedua bentuk surat berharga tersebut tidak sama menyebabkan gugatan menjadi kabur;

bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian khususnya pasal 1878 ayat 3 B.W.;

Menimbang :

mengenai keberatan tersebut :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa tergugat asal telah mengeluarkan cek dan giro bilyet yang diserahkan kepada penggugat asal;

bahwa cek adalah alat pembayaran yang sah, sedangkan giro bilyet adalah perintah pemindah-bukuan dana pada rekening orang lain dan dalam hal ini oleh karena cek dan giro bilyet telah diserahkan oleh tergugat asal kepada penggugat asal, maka dapat disimpulkan adanya hubungan hukum antara penggugat asal dan tergugat asal dan dengan diterimanya oleh penggugat asal cek, giro bilyet dan kwitansi tersebut maka penggugat asal mempunyai hak atas jumlah yang tertulis dalam cek, giro bilyet dan kwitansi tersebut;

bahwa sebaliknya tergugat asal tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa ia hanya berhutang sekitar Rp. 81.000.000,—. Sedangkan apabila di dalam jumlah-jumlah yang tertera dalam cek, giro bilyet dan kwitansi tersebut sudah termasuk bunga, maka hal itu adalah dengan penuh kesadaran dan persetujuannya dari tergugat asal sendiri;

bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Aliansyah Alie tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Agustus 1982 No. 135/1982/B/Pdt.P.T.BJM. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Maret 1982 No. 12/1982. Perd. B. dalam Pokok Perkara Kompensi, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970; Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950;

Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tgl. 12 Agustus 1982,
No. : 135/1982/B/Pdt.P.T.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN yang mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan keputusan di bawah ini dalam perkara antara :

Mar'ie Talib : Pekerjaan dagang, penduduk dan bertempat tinggal di jalan S. Parman No. 26 Banjarmasin, dikuasakan kepada : T.D. Patianom, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 1982.

(Semula sebagai tergugat konpensi/penggugat rekompensi sekarang pembanding);

berlawanan dengan

Aliansyah Alie : pekerjaan dagang, penduduk dan bertempat tinggal di jalan A. Yani No. 232 Km. 4½ Banjarmasin.

(Semula sebagai penggugat konpensi/tergugat rekompensi sekarang terbanding);

Dengan mengingat akan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Juli 1982, No. 135/1982/B/Pdt.PT.Bjm, yang menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tersebut dengan Hakim Tunggal.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Maret 1982 No. 12/1982.Perd.B. yang diktumnya sebagai berikut :

A. Dalam Gugatan Konpensi :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat.

Menetapkan pemeriksaan untuk diteruskan.

II. Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti penggugat.

Menyatakan bahwa tergugat adalah lalai (wanprestasi) untuk membayar kembali pinjamannya kepada penggugat sebesar Rp.259.983.600,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menghukum tergugat untuk membayar kembali pinjamannya kepada penggugat sebesar Rp.259.983.600,— (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 5% setiap bulan berupa keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh penggugat untuk pinjaman sebesar :

Rp. 143.075.000,— terhitung sejak 1 Juli 1980.

Rp. 24.680.437,— terhitung sejak 1 September 1980.

Rp. 92.228.163,— terhitung sejak 9 Maret 1981.

hingga keputusan ini dilaksanakan.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik tergugat yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 1982 dan tanggal 25 Maret 1982 No. 12/1982/Perd.B. dan Jurusita Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Pebruari 1982 dan tanggal 26 Maret 1982 No. 12/1982/Perd.B.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 288.625,— (dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

B. Dalam Gugatan Rekompensi :

Menolak gugatan penggugat.

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar nihil.

Menimbang, bahwa menurut berita acara yang dibuat oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa tergugat kompensi/ penggugat rekompensi pada tanggal 30 Maret 1982 telah menyatakan naik banding, bandingan mana pada tanggal 2 April 1982 telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama.

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa permohonan untuk banding terhadap putusan

tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan dengan sempurna diberitahukan kepada pihak lawannya juga syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa tergugat konpensi/penggugat rekompensi/pembanding pada tanggal 30 April 1982 dan kotra memorie banding yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekompensi - terbanding pada tanggal 17 Mei 1982, telah diteliti dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Dalam Kompensi :

bahwa ternyata Hakim Pertama mencampur adukkan jumlah uang yang tertulis dalam lembaran cheque-cheque dan giro bilyet, pada hal bentuk-bentuk kertas berharga ini tidak sama dalam kekuatan hukumnya sehingga tidak adanya perincian yang jelas menjadikan gugatan ini kabur pengertiannya.

bahwa yang disebut giro bilyet yang tidak diatur kekuatan berlakunya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang menurut Edaran Bank Indonesia hanya disebut sebagai surat perintah pemindah bukuan sejumlah dana, sehingga untuk kekuatan hukumnya sebagaimana surat berharga diperlukan adanya perbuatan hukum lain yaitu perbuatan pemindah bukuan dana yang bisa terjadi apabila dananya si penarik cukup tersedia.

bahwa apabila ternyata dananya tidak mencukupi atau disebut dengan istilah kosong (giro bilyet kosong) maka kertas yang berbentuk giro bilyet itu tidak ada harganya, sehingga oleh karenanya pencampur adukkan jumlah hutang yang tertulis di dalam cheque dan giro bilyet adalah mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur.

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam gugatan ini tidak jelas mana jumlah yang dianggap pokok dan mana jumlah yang dianggap bunganya, sebab menurut kebiasaan orang berhutang selalu disebut jelas pokok hutangnya, apalagi apabila dihubungkan dengan jaminan yang berupa giro bilyet di mana nilai nominalnya biasanya tidak merupakan jumlah pokok hutang. Tetapi sesudah ditambah dengan perhitungan bunganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Hakim Pertama adalah tidak tepat berdasarkan pertimbangan yang tidak tepat pula, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri berdasarkan pertimbangan sendiri pula.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, serta dapat disetujui dan dijadikan alasan sendiri oleh Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Maret 1982 Nomor 12/1982/Perd. B. dapatlah dikuatkan.

Menimbang, oleh karena penggugat konpensi/tergugat rekonpensi - terbanding berada di pihak yang dikalahkan maka wajarlah biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan dibebankan kepadanya.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari tergugat konpensi/penggugat rekonpensi - pembanding tersebut.

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 12/1982 Perd. B. tanggal 27 Maret 1982.

Dalam Pokok Perkara :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Maret 1982 Nomor 12/1982. Perd. B. yang dimohonkan banding itu.

Mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Maret 1982 Nomor 12/1982.Perd.B. untuk sebagian rekonpensi.

Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonpensi - terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding dirancang sebesar Rp. 16.675,- (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Memerintahkan agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 1982

oleh kami T. Boestomi, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, keputusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Nursitawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tgl. 27 Maret 1982 No. 12/1982 Perd. B.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Aliansyah Alie, pekerjaan dagang, penduduk dan bertempat tinggal di Banjarmasin, Jln.A. Yani No. 232 Km. 4½, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Mar'ie Talib, pekerjaan dagang, penduduk dan bertempat tinggal di Banjarmasin, Jln. S. Parman No. 26, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Januari 1982 di bawah register No. 12/1982 Perd.B., pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa tergugat secara berturut-turut telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.259.983.600,—, dengan perincian sebagai berikut :

1. tanggal 5-5-1980 sebanyak Rp. 16.000.000,—
2. tanggal 6-5-1980 sebanyak Rp. 9.000.000,—
3. tanggal 7-5-1980 sebanyak Rp. 5.000.000,—
4. tanggal 7-5-1980 sebanyak Rp. 5.000.000,—
5. tanggal 9-5-1980 sebanyak Rp. 5.000.000,—
6. tanggal 9-5-1980 sebanyak Rp. 10.000.000,—
7. tanggal 9-5-1980 sebanyak Rp. 4.000.000,—
8. tanggal 9-5-1980 sebanyak Rp. 5.000.000,—
9. tanggal 14-5-1980 sebesar Rp. 10.000.000,—

10.	tanggal 14-5-1980 sebanyak Rp.	12.500.000,-
11.	tanggal 14-5-1980 sebanyak Rp.	10.000.000,-
12.	tanggal 15-5-1980 sebanyak Rp.	5.000.000,-
13.	tanggal 17-5-1980 sebanyak Rp.	10.000.000,-
14.	tanggal 20-5-1980 sebanyak Rp.	5.000.000,-
15.	tanggal 20-5-1980 sebanyak Rp.	1.500.000,-
16.	tanggal 20-5-1980 sebanyak Rp.	1.300.000,-
17.	tanggal 20-5-1980 sebanyak Rp.	1.500.000,-
18.	tanggal 20-5-1980 sebanyak Rp.	3.000.000,-
19.	tanggal 20-5-1980 sebanyak Rp.	1.300.000,-
20.	tanggal 20-5-1980 sebanyak Rp.	2.200.000,-
21.	tanggal 20-5-1980 sebanyak Rp.	5.000.000,-
22.	tanggal 21-5-1980 sebanyak Rp.	5.000.000,-
23.	tanggal 23-5-1980 sebanyak Rp.	1.000.000,-
24.	tanggal 22-5-1980 sebanyak Rp.	5.000.000,-
25.	tanggal 23-5-1980 sebanyak Rp.	1.500.000,-
26.	tanggal 24-5-1980 sebanyak Rp.	800.000,-
27.	tanggal 24-5-1980 sebanyak Rp.	1.000.000,-
28.	tanggal 25-5-1980 sebanyak Rp.	1.000.000,-
29.	tanggal 27-5-1980 sebanyak Rp.	1.875.000,-
30.	tanggal 29-5-1980 sebanyak Rp.	1.200.000,-
31.	tanggal 20-7-1980 sebanyak Rp.	3.219.187,-
32.	tanggal 20-7-1980 sebanyak Rp.	21.461.250,-
33.	tanggal 9-2-1980 sebanyak Rp.	92.228.163,-

jumlah Rp. 259.983.600,-

bahwa untuk masing-masing pinjaman itu tergugat berjanji akan membayar kembali lunas kepada penggugat dalam waktu paling lama satu bulan setelah tanggal dari pinjaman tersebut, akan tetapi janji tergugat tidak ditepatinya, sehingga dengan demikian tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada penggugat sebanyak Rp. 259.983.600,-, maka akibat daripada itu penggugat sebagai pedagang telah dirugikan dengan hilangnya keuntungan sebesar 6% tiap bulan yang seharusnya dapat dinikmati;

bahwa atas kerugian itu penggugat juga mohon agar tergugat dihukum pula untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 6% setiap bulan, hingga keputusan ini dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar

kedua belah pihak dipanggil menghadap dalam persidangan dan dijatuhkan keputusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang penggugat ajukan dalam perkara ini;

Menyatakan bahwa tergugat berada dalam keadaan lalai (wanprestasi);

Menghukum tergugat untuk membayar kembali pinjamannya kepada penggugat sebanyak Rp. 259.983.600,— (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah) secara sekaligus dan tunai;

Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa keuntungan yang diharapkan ("winstderving") akibat tertahannya uang penggugat sebanyak 6% tiap-tiap bulan, yaitu untuk pinjaman-pinjaman dalam bulan Mei 1980 sebanyak Rp. 143.075.000,— terhitung sejak tanggal 1 Juli 1980, untuk pinjaman dalam bulan Juli sebanyak Rp. 24.680.437,— terhitung sejak tanggal 1 September 1980, dan untuk pinjaman dalam bulan Pebruari 1981 sebanyak Rp. 92.228.163,— terhitung sejak tanggal 9 Maret 1981, dan seterusnya diperhitungkan sampai keputusan dalam perkara ini dilaksanakan;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin atas barang-barang hak milik tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (executie uitvoerbaar bij voorraad) meskipun verzet, banding atau kasasi;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

A t a u :

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing datang menghadap secara sah dalam persidangan yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak dapat didamaikan, dan setelah penggugat menyatakan tetap dalam segala dalih dan pendiriannya, tergugat di samping mengajukan eksepsi, juga mengajukan gugatan balik (gugatan rekompensi), yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

A. Dalam Gugatan Kompensi

I. Dalam Eksepsi

bahwa gugatan penggugat adalah tidak sempurna, karena tanpa menggugat pula Suhaimi sebagai tergugat II, di mana ia telah menandatangani dan menerbitkan serta penanggung jawab atas cheque-cheque dari BNI ialah cheque-cheque nomor :

117888	tanggal 20-5-1980	seharga Rp.	1.500.000,-
117831	tanggal 20-5-1980	seharga Rp.	1.300.000,-
117892	tanggal 20-5-1980	seharga Rp.	1.500.000,-
120754	tanggal 20-5-1980	seharga Rp.	3.000.000,-
117887	tanggal 20-5-1980	seharga Rp.	1.500.000,-
117549	tanggal 20-5-1980	seharga Rp.	2.200.000,-
117889	tanggal 21-5-1980	seharga Rp.	5.000.000,-
117882	tanggal 21-5-1980	seharga Rp.	100.000,-
117536	tanggal 22-5-1980	seharga Rp.	3.100.000,-
117893	tanggal 23-5-1980	seharga Rp.	1.500.000,-
377344	tanggal 24-5-1980	seharga Rp.	800.000,-
120044	tanggal 24-5-1980	seharga Rp.	1.000.000,-
117532	tanggal 25-5-1980	seharga Rp.	1.000.000,-
117894	tanggal 27-5-1980	seharga Rp.	1.875.000,-
120034	tanggal 29-5-1980	seharga Rp.	1.200.000,-

Rp. 26.575.000,-

dan Hariyanto alias Ping Seng sebagai tergugat ke-III, disebabkan ia telah menandatangani dan menerbitkan cheque-cheque O.E.B. No. 526212 tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergugat mohon agar gugatan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara

bahwa tergugat memang benar mempunyai hutang kepada penggugat, akan tetapi tidak sebesar Rp. 259.983.600,- dan terjadinya hutang piutang itu berawal semula pada adanya bagian kerjasama dalam proyek pembangunan pertokoan, akan tetapi karena terjadi force mayeur di mana keuntungan tidak berhasil diraih, sedangkan penggugat masih membebani bunga sebesar 10% sampai dengan 15% untuk tiap bulan, di samping bunga-bunga harian;

bahwa hutang tergugat kepada penggugat itu terjadi sebagaimana tersebut di atas, jadi tidak atas dasar surat perjanjian pinjam-meminjam

menurut ketentuan hukum, sehingga oleh karena itu gugatan penggugat adalah sama sekali tidak berdasar pada alasan hak, lebih-lebih karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata;

bahwa penggugat telah dengan sengaja membuat laporan palsu tentang diri tergugat kepada Kepolisian Resort 1301, bahwa tergugat akan melarikan diri, dan menuduh tergugat menerima pinjaman uang dari Ibu Nelly Adam Malik, sehingga akibat keterangan palsu dari penggugat tersebut nama baik tergugat menjadi hancur, dan martabat tergugat menjadi turun, karenanya tergugat menderita kerugian, untuk perbuatan penggugat itu terpaksa tergugat juga mengadukan kepada Kepolisian Resort 1301 bahwa penggugat melakukan praktek rentenir dan memfitnah;

bahwa sehubungan dengan itu tergugat mohon agar dapat dijatuhkan keputusan sela, ialah menghentikan atau menangguhkan sementara pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan kepada yang berwajib untuk mengusut tindak pidana penggugat dalam kasus ini;

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah teruraikan di atas, maka sita concervatoir dalam perkara ini mohon untuk dapat diangkat dan mohon pula agar gugatan penggugat itu ditolak seluruhnya;

B. Dalam Gugatan Rekonpensi

bahwa akibat dari perbuatan tergugat membuat laporan palsu kepada Kepolisian Resort 1301 sebagaimana terurai dalam pokok perkara di atas, maka berakibat menurunnya martabat dan nama baik penggugat;

bahwa akibat martabat dan nama baik penggugat dicemarkan oleh tergugat, maka penggugat berhak menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan untuk menjamin tuntutan penggugat itu penggugat mohon agar diletakkan sita concervatoir atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin dapat :

A. Memberikan Keputusan Sela (Interlecutoir Vonnis)

I. Menghentikan atau menangguhkan sementara pemeriksaan perkara Perdata No. 12/1982 Perd.B. ini;

II. Memerintahkan kepada yang berwajib untuk mengusut tindak pidana yang dilakukan tergugat rekonpensi, yaitu :

a. melakukan praktek rentenir berdasarkan Undang-undang Riba (Woeker Ordonantie, S. 1938—524) serta Undang-undang inklusif peraturan lain yang bersangkutan;

b. sengaja membuat laporan pengaduan "secara memfitnah" vide pasal 317 KUHP;

B. Kemudian setelah selesai proses pidananya dengan keputusan Hakim dapat memeriksa perkara Perdata No. 12/1982 Perd.B., dan selanjutnya mohon pula agar:

I. Dalam Kompensi

Menerima eksekusi tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Mengangkat kembali sita conservatoir yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara gugatan kompensi tersebut;

Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

II. Dalam Rekonpensi :

Mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan penggugat rekonpensi, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan;

Menyatakan bahwa tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum tergugat rekonpensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,— (tiga milyar rupiah) untuk memulihkan nama baik yang telah dihancurkan, dan untuk mengembalikan martabat yang telah dirusak;

Menyatakan sah dan berharga sita conservatoir dalam rekonpensi ini;

Menyatakan bahwa putusan dalam rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun tergugat rekonpensi verzet, banding ataupun kasasi;

Menghukum tergugat rekonpensi membayar semua ongkos perkara;

Setidak-tidaknya :

Memberikan keputusan lain yang selaras dengan rasa keadilan di dalam suatu peradilan yang baik dan luhur;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing dalam persidangan selanjutnya masih saling mengokohkan dalih dan pendiriannya, ialah penggugat kompensi mengajukan bukti-bukti berupa :

Bilyet giro BNI 1946 tanggal 5-5-1980 seharga Rp. 16.000.000,- (bukti P.-1);

- Cheque BNI 1946 tanggal 6-6-1980 seharga Rp. 9.000.000,-
(bukti P.-2);
- Surat penolakan warkat lalu-lintas pembayaran giral dari BNI
1946 tanggal 2 Pebruari (bukti P.-3);
- Bilyet giro BRI tanggal 7-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,-
(bukti P.-4);
- Bilyet giro BRI tanggal 7-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,-
(bukti P.-5);
- Bilyet giro BRI tanggal 9-5-1980 seharga Rp. 10.000.000,-
(bukti P.-6);
- Bilyet giro BRI tanggal 9-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,-
(bukti P.-7);
- Bilyet giro BRI tanggal 9-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,-
(bukti P.-8);
- Bilyet giro BRI tanggal 14-5-1980 seharga Rp. 4.000.000,-
(bukti P.-9);
- Bilyet giro BRI tanggal 14-5-1980 seharga Rp. 12.500.000,-
(bukti P.-10);
- Bilyet giro BRI tanggal 14-5-1980 seharga Rp. 10.000.000,-
(bukti P.-11);
- Bilyet giro BRI tanggal 14-5-1980 seharga Rp. 10.000.000,-
(bukti P.-12);
- Bilyet giro BRI tanggal 15-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,-
(bukti P.-13);
- Bilyet giro BRI tanggal 17-5-1980 seharga Rp. 10.000.000,-
(bukti P.-14);
- Bilyet giro BRI tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,-
(bukti P.-15);
- Surat keterangan penolakan warkat lalu-lintas pembayaran giral
dari BRI tanggal 1-2-1980 (bukti P.-16);
- Cheque BNI 1946 tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 1.500.000,-
(bukti P.-17);
- Cheque BNI 1946 tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 1.300.000,-
(bukti P.-18);
- Cheque BNI 1946 tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 1.500.000,-
(bukti P.-19);
- Cheque BNI 1946 tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 3.000.000,-
(bukti P.-20);

- Surat keterangan penolakan warkat lalu-lintas pembayaran giral dari B.N.I. 1946 tanggal 1-2-1982 (bukti P.-21);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 1.500.000,- (bukti P.-22);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 2.200.000,- (bukti P.-23);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 21-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,- (bukti P.-24);
- Bilyet giro O.E.B. tanggal 20-5-1980 seharga Rp. 5.000.000,- (bukti P.-25);
- Penjelasan atas warkat clearing yang ditolak, tanggal 20-5-1980 (bukti P.-26);
- Memo Toko Samodera, Jln. Pasar Baru No. 222/10 Banjarmasin tentang pembatalan bilyet giro tanggal 20-5-1980 (bukti P.-27);
- Surat pernyataan Achmat Talib tentang pinjaman satu lembar Bilyet giro O.E.B. No. 526212 tanggal 29-4-1980 (bukti P.-28);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 21-5-1980 seharga Rp. 100.000,- (bukti P.-29);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 22-5-1980 seharga Rp. 3.100.000,- (bukti P.-30);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 23-5-1980 seharga Rp. 1.500.000,- (bukti P.-31);
- Bilyet giro B.N.I. 1946 tanggal 24-5-1980 seharga Rp. 800.000,- (bukti P.-32);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 24-5-1980 seharga Rp. 1.000.000,- (bukti P.-33);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 25-5-1980 seharga Rp. 1.000.000,- (bukti P.-34);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 27-5-1980 seharga Rp. 1.875.000,- (bukti P.-35);
- Cheque B.N.I. 1946 tanggal 29-5-1980 seharga Rp. 1.200.000,- (bukti P.-36);
- Kwitansi tanda terima pinjaman sementara tergugat dari penggugat tanggal 20-7-1980 sebesar Rp. 92.219.187,- (bukti P.-37);
- Kwitansi tanda terima pinjaman sementara tergugat dari penggugat tanggal 20-7-1980 sebesar Rp. 21.461.250,- (bukti P.-38);
- Kwitansi tanda terima pinjaman sementara tergugat dari penggugat tanggal 2-2-1981 sebesar Rp. 82.228.163,- (bukti P.-39);
- Surat dari tergugat kepada penggugat tentang penagihan penggugat

berupa jaminan cheque serta dikenakan bunga 10% dan 15% setiap bulan tanggal 3-2-1982 (bukti P.-40);

Sedangkan tergugat dalam konpensi mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat dari tergugat kepada penggugat tentang jaminan berupa cheque yang dikenakan bunga 10% - 15% tanggal 3-2-1982 (bukti T.-1);

Surat pengakuan dari penggugat tentang tergugat pernah datang kerumah penggugat untuk mengajak kerja-sama dalam pembangunan pertokoan bertingkat III di Jalan Kolonel Soegiono Banjarmasin, tertanggal 23-3-1981 (bukti T.-2);

Surat perintah penangkapan dari Kepolisian Daerah XIII Kalimantan Bagian Selatan-Tengah, Komando Resor Kepolisian Kota 1301 Kodya Banjarmasin tanggal 13-2-1982 No.P.020/II/1982/SERSE, terhadap diri tergugat (bukti T.-3);

Surat pengaduan tergugat kepada Kepolisian Resor 1301 Kotamadya Banjarmasin tanggal 12-2-1982 terhadap diri penggugat sebagai rentenier (bukti T.-4);

Susulan surat pengaduan dari tergugat tanggal 18-2-1982 kepada Resor Kepolisian 1301 terhadap penggugat atas praktek rentenier dan fitnah terhadap diri tergugat (bukti T.-5);

Susulan surat tergugat tanggal 8-3-1982 kepada Resor Kepolisian 1301 terhadap penggugat atas praktek rentenier dan fitnah dari tergugat (bukti T.-6);

Susulan surat pengaduan tergugat tanggal 8-3-1982 (bukti P.-7); dan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi ke-1 dari tergugat : Mahyuni bin Bakri

bahwa saksi sering disuruh oleh tergugat datang kepada penggugat untuk menghantarkan cheque, dan setiap kedatangannya itu : penggugat selalu menukarnya dengan uang tunai, untuk kemudian tergugat sampaikan kepada tergugat;

bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, baik dalam hubungan perdagangan, hubungan kerjasama, maupun adanya hutang-piutang yang pakai bunga;

Saksi ke-II dari tergugat : M. Helmi Suheimi

bahwa saksi benar pernah mengeluarkan sebanyak 15 lembar

cheque untuk kepentingan dan atas permintaan tergugat;

bahwa cheque-cheque tersebut dikeluarkan adalah merupakan cheque-cheque tunda;

bahwa tentang ada atau tidaknya pembebanan bunga 10% – 15% atas hutang tergugat kepada penggugat, sebenarnya saksi tidak mengetahui, namun tergugat telah memerintahkan kepada saksi agar dalam persidangan saksi menerangkan bahwa penggugat telah membebani bunga atas hutang tergugat itu sebesar 10% – 15%;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak akhirnya dengan tidak akan mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi lagi, selanjutnya mohon keputusan;

Tentang hukumnya

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tergugat menyatakan, bahwa gugatan penggugat adalah tidak lengkap, dikarenakan penggugat tidak menggugat juga Suhaimi maupun Harryanto alias Ping Seng, dimana masing-masing adalah yang menandatangani — karenanya ia juga bertanggung jawab atas cheque dan giro bilyet dari B.N.I. 1946 dan O.E.B., oleh sebab itu gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena hubungan hutang-piutang terjadi adalah hanya antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu hanya berlaku mengikat diantara kedua pihak itu saja, yang berarti bahwa persetujuan tersebut tidaklah dapat membawa rugi maupun keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali apabila diperjanjikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena selain antara kedua pihak itu tidak diperjanjikan apapun bagi pihak ketiga, utamanya bagi Suhaimi maupun Harryanto alias Ping Seng, maka dengan demikian dalih bahwa penggugat seharusnya juga menggugat Suhaimi dan Harryanto alias Ping Seng itu adalah tidak berdasar pada hukum maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tergugat tersebut tidak berdasar pada hukum dan kepatutan, maka harus ditolak, dan pemeriksaan perkara pokoknya harus dilanjutkan;

Dalam Gugatan Konpensasi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud sebagai-

mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan tentang ada atau tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dalam bentuk hutang piutang, dan seandainya ada hubungan hutang piutang tersebut perlu dipertimbangkan pula tentang sah atau tidak sahnya hubungan hukum tadi;

Menimbang, bahwa kini harus diteliti dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum dalam bentuk hutang-piutang tersebut, yang ternyata tergugat secara tegas dan pasti mengakui bahwa benar ia (tergugat) mempunyai hutang kepada penggugat dalam hal kerjasama antara penggugat dan tergugat di dalam perkongsian proyek, akan tetapi tidak sebesar Rp. 259.983.600,— sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan penggugat, melainkan hanyalah sebesar Rp. 81.500.000,—;

Menimbang, bahwa tentang dalih tergugat bahwa hutang-piutang antara penggugat dengan tergugat adalah tidak sah, karena tidak beralas hak itu haruslah dipertimbangkan tentang kebenarannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menyangkal bahwa ia (tergugat) berhutang kepada penggugat di dalam rangka kelancaran perdagangan, kendatipun tidak sebesar yang dituntut oleh penggugat, dimana hutang piutang tersebut adalah benar atas sepakat kedua pihak tanpa adanya tekanan ataupun karena paksaan, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 1320 K.U.H. Perdata;

Menimbang, bahwa dalam praktek perdagangan bentuk hubungan hutang-piutang sebagaimana yang telah dihayati oleh kedua belah pihak itu adalah merupakan suatu kebiasaan yang mewarnai lancarnya peredaran modal, sehingga haruslah dianggap secara diam-diam dimasukkan sebagai persetujuan, oleh karena itu, maka hubungan hutang-piutang tadi haruslah dianggap sebagai telah sah, kendatipun tidak secara tegas-tegas dinyatakan, dan oleh karenanya pula maka hubungan perjanjian hutang piutang itu menjadi mengikat kedua pihak sebagai Undang-undang;

Menimbang, bahwa karena hutang-piutang antara kedua belah pihak itu adalah benar ada dan terjadi, serta sah menurut hukum, baik karena bersandar pada pengakuan dari tergugat sendiri, maupun atas dasar pembuktian yang sah pula, maka kini harus diteliti tentang besarnya nilai hutang piutang itu yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena besarnya nilai gugatan penggugat itu disanggah oleh tergugat, maka penggugat untuk itu mengajukan alat pembuktiannya berupa P.—1 s/d P.—40, dan atas surat-surat bukti ter-

sebut tidak dapat secara tegas memberikan bantahan tentang kebenaran besarnya nilai gugatan penggugat sebesar Rp. 259.983.600,—, melainkan hanya menyatakan bahwa besarnya nilai gugatan penggugat termaksud hanyalah dikarenakan pembebanan bunga dari penggugat atas hutang tergugat sebesar 10% — 15%;

Menimbang, bahwa meskipun demikian masih harus dipertimbangkan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti P.—1 s/d P.—40 yang diajukan oleh penggugat, ialah berupa surat bukti cheque dan bilyet giro (bukti P.—1, P.—2, P.—4 s/d P.—15, P.—17 s/d P.—20, P.—22 s/d P.—25, P.—29 s/d P.—36), surat penolakan warkat lalu-lintas pembayaran giral (P.—3, P.—16, P.—21), kwitansi (P.—37 s/d p.—39) dan surat-surat bukti lainnya (P.—26 s/d P.—28 dan P.—40), yang menurut kebiasaan yang berlaku dalam praktek perdagangan, bahwa cheque dan bilyet giro lazim digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa karena cheque dan bilyet giro termaksud di atas digunakan sebagai alat pembayar, baik karena kelaziman maupun karena atas sepakat kedua pihak, namun karena ternyata sewaktu penggugat menguangkan pada bank-bank yang bersangkutan tidak dapat terlaksana (tidak dapat tercairkan), karena dana kosong, maka dengan demikian berarti bahwa tergugat jelas belum melunasi hutangnya kepada penggugat (wanprestasi);

Menimbang, bahwa meskipun di dalam hukum pembuktian (pasal 1878 B.W.) cheque dan bilyet giro adalah digolongkan sebagai akta di bawah tangan, yang berarti hanya merupakan suatu pengakuan hutang secara sepihak, akan tetapi karena tergugat sebagai pengusaha menggunakan dalam menjalankan perusahaannya, maka cheque dan bilyet giro tersebut menjadi tunduk pada ketentuan pasal 1878 ayat 3 K.U.H. Perdata, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa cheque dan bilyet giro tersebut merupakan alat pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig bewijs);

Menimbang, bahwa karena cheque dan bilyet giro adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum isinya pun adalah benar;

Menimbang, bahwa tentang kekuatan pembuktian bagi kwitansi (P.—37 s/d P.—39) yang diajukan oleh penggugat, yang juga merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi karena tergugat juga tidak menyangkal sahnya tandatangan di atasnya, maka bukti P.—37 s/d P.—39 itu adalah sebagai alat bukti yang sempurna, setingkat dengan otentisitasnya suatu alat bukti otentik, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal.

1875 K.U.H. Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti berupa P.-1, P.-2, P.-4 s/d P.-15, P.-17 s/d P.-20, P.-22 s/d P.-25, P.-29 s/d P.-36, dan P.-37 s/d P.-39 adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, ialah sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan maksudnya menyangkal dalih dan pendirian penggugat, disamping mengajukan surat-surat bukti P.-1 s/d T.-7, juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing saksi Mahyuni bin Bakri dan Suhaimi, namun ternyata surat-surat bukti-bukti mana sama sekali tidak menyentuh tujuannya menyangkal dalih dan pendirian penggugat tentang adanya hutang tergugat kepada penggugat, dan besarnya nilai hutang tersebut, melainkan hanya menunjukkan adanya hutang dan adanya kerjasama (bukti T.-1 dan T.-2) dan surat pembuktian adanya tindakan kepolisian atasnya serta pengaduan adanya praktek rentenier dan perbuatan fitnah dari penggugat (bukti T.-3 s/d T.-7) yang sama sekali tidak menyentuh sarannya;

Menimbang, bahwa keterangan persaksian baik saksi ke-I: Mahyuni bin Bakri maupun saksi ke-II: Suhaimi, sama sekali tidak menguntungkan dalam menompang pendirian bantahan tergugat atas dalih dan pendirian penggugat, khususnya tentang adanya hubungan kerjasama antara penggugat dengan tergugat, hubungan hutang-piutang, dan pembebanan bunga sebesar 10% - 15% atas hutang tergugat tersebut, karena secara jelas dan tegas Saksi Mahyuni bin Bakri menerangkan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hubungan antara kedua pihak, apalagi hubungan pembebanan bunga tersebut, sedangkan Saksi Suhaimi, meskipun di dalam persidangan mula-mula ia menerangkan pengetahuannya tentang hubungan antara kedua pihak dalam usaha perdagangan, dan pembebanan bunga atas hutang tergugat kepada penggugat sebesar 10% - 15%, namun akhirnya Saksi Suhaimi tersebut mengakui secara terus terang, bahwa keterangan persaksiannya itu adalah sama sekali tidak benar, karena keterangan persaksian tersebut disampaikan di dalam persidangan adalah atas permintaan dan perintah tergugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi Suhaimi khususnya adalah sedemikian rupa, maka tidak mempunyai penilaian persaksian, ialah bukan karena pengetahuannya sendiri, melainkan atas kehendak dan atas perintah tergugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.-17 s/d P.-36, Saksi Suhaimi

mengakui bahwa benar ialah yang menandatangani bukti-bukti tersebut, namun penandatanganan mana adalah semata-mata atas kehendak dan untuk kepentingan tergugat, sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara saksi Suhaimi tersebut dengan penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata kedudukan tergugat adalah sedemikian rupa, ialah tergugat tidak berhasil untuk mengokohkan dalih bantahannya atas pendirian penggugat, maka ia (tergugat) harus dinyatakan sebagai yang dikalahkan, karenanya ia (tergugat) harus dibebani untuk memikul semua beaya perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian masih harus dipertimbangkan tentang tuntutan penggugat mengenai besarnya ganti kerugian berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 6% tiap bulan itu Majelis Hakim menilainya terlalu berat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai layak dan adil apabila besarnya ganti kerugian itu adalah sebesar 5% bagi masing-masing perimbangan hutang dalam setiap periode pembayaran;

Menimbang pula, bahwa tentang tuntutan penggugat agar keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi haruslah ditolak, karena disamping adanya jaminan dana berupa benda tetap dan bernilai memadai dengan besarnya piutang, juga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 191 R. Bg.;

Dalam Gugatan Rekompensi :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam rekompensi diajukan secara sah dan tepat pada tenggang waktu ditentukan menurut hukum, maka gugatan penggugat tersebut harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat bermaksud agar tergugat dinyatakan sebagai melawan hukum, karena tergugat telah membuat laporan palsu kepada Koresta 1301 yang menuduh penggugat hendak melarikan diri, oleh karena itu untuk memulihkan nama baik yang telah dihancurkan oleh tergugat, serta untuk mengembalikan martabat penggugat yang telah dirusak oleh tergugat itu, penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi, sejauh ada kaitan hubungannya dengan gugatan rekompensi dianggap telah dimasukkan pula sebagai pertimbangan da-

lam gugatan reconpensi termaksud;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat di hukum dengan dinyatakan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat tersebut, sehingga oleh karena itu gugatan penggugat itu adalah tidak errbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat itu ditolak, maka ia (penggugat) juga harus di hukum untuk membayar beaya perkara ini;

Menyadarkan pada Hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 1320 jo pasal 1347 K.U.H. Perdata jo pasal 189 R. Bg.

MENGADILI

A. Dalam Gugatan Konpensi :

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat;

Menetapkan pemeriksaan perkara untuk diteruskan;

II. Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti penggugat;

Menyatakan bahwa tergugat adalah lalai (wanprestasi) untuk membayar kembali pinjamannya kepada penggugat sebesar Rp. 259.983.600,-;

Menghukum tergugat untuk membayar kembali pinjamannya kepada penggugat sebesar Rp. 259.893.600,-;

Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 5% setiap bulan berupa keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh penggugat, untuk pinjaman sebesar :

Rp. 143.075.000,- terhitung sejak tanggal 1-7-1980;

Rp. 24.680.437,- terhitung sejak tanggal 1-9-1980;

Rp. 92.228.163,- terhitung sejak tanggal 9-3-1981;

hingga keputusan ini dilaksanakan;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concernatoir beslag) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik tergugat yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 1982, dan tanggal 25 Maret 1982 No. 12/1982 Perd. B., dan Jurusita Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Pebruari 1982 dan tanggal 26 Maret 1982 No. 12/1982 Perd.B.;

Menghukum tergugat untuk membayar beaya perkara ini yang hingga

kini ditafsir sebesar Rp. 288.625,- (duaratus delapanpuluh delapan ri-
bu enamratus duapuluh lima rupiah);

B. Dalam Gugatan Rekonpensi :

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga
kini ditafsir sebesar nihil.

Demikianlah diputuskan pada haru Sabtu tanggal 27 Maret 1982,
oleh Kami, S.P. Soenarto, S.H., Ketua, D. Tumanggor, S.H., Erman
Tanri, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggauta, keputusan mana diucapkan
oleh Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan diha-
diri oleh para Hakim Anggauta, S. Harahap, S.H., Panitera Pengganti
dan kedua belah pihak.